DAMPAK INFLASI DAN PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN PROVINSI RIAU

Indri Wulandari[1], Darmayuda[2], Putri Asrina[3]

[1,2,3]*Universitas Riau*
E-mail : [1]indri.wulandari2327@student.unri.ac.id, [2]darmayuda@lecturer.unri.ac.id, [3]putriasrina@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak inflasi dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau periode 2013 hingga 2023. Ketimpangan pendapatan merupakan isu ekonomi yang signifikan, terutama di wilayah berkembang seperti Riau, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong oleh sumber daya alam tidak selalu menjamin distribusi kekayaan yang adil. Ketimpangan ini dapat berdampak negatif pada kualitas hidup, memperparah kemiskinan, dan memperburuk kesejahteraan sosial.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara inflasi (X1), pengangguran (X2), dan ketimpangan pendapatan (Y). Data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau digunakan. Temuan menunjukkan bahwa, secara bersamaan, baik inflasi maupun pengangguran secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Secara individu, inflasi menunjukkan dmpak positif namun tidak signifikan secara statistik, sementara pengangguran memiliki dampak positif dan signifikan, memperlebar ketimpangan pendapatan. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal yang komprehensif, termasuk stabilisasi harga dan penciptaan lapangan kerja, diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

Kata Kunci : *Inflasi, Pengangguran, Distribusi Pendapatan, Koefisien Gini, Provinsi Riau.*

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar kelima secara nasional dan terbesar kedua di luar Pulau Jawa. Kinerja ekonomi tersebut terutama ditopang oleh sektor berbasis sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi serta perkebunan kelapa sawit, yang berkontribusi signifikan terhadap penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun capaian PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau menunjukkan tren yang relatif positif dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan tersebut tidak serta-merta diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Ketergantungan yang tinggi pada sektor komoditas membuat perekonomian Riau rentan terhadap fluktuasi harga global, yang berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sejalan dengan Kuncoro (2006), pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin pemerataan pendapatan apabila struktur ekonomi terkonsentrasi pada sektor tertentu. Kondisi ini menjadikan ketimpangan pendapatan sebagai isu krusial yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya di daerah dengan karakteristik ekonomi ekstraktif seperti Provinsi Riau.

Ketimpangan pendapatan, yang umumnya diukur melalui koefisien Gini, mencerminkan ketidakmerataan distribusi pendapatan antarindividu atau kelompok dalam suatu wilayah. Tingkat ketimpangan yang tinggi tidak hanya berimplikasi pada menurunnya kesejahteraan sosial, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta memperparah kemiskinan (World Bank, 2022). Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor makroekonomi yang memengaruhi ketimpangan pendapatan menjadi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif.

Inflasi dan pengangguran merupakan dua variabel makroekonomi yang sering dikaitkan dengan dinamika ketimpangan pendapatan. Inflasi yang tidak terkendali cenderung menurunkan pendapatan riil masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan (Bank Indonesia). Sementara itu, tingginya tingkat pengangguran mengurangi kesempatan memperoleh pendapatan dan memperlebar jurang kesejahteraan antara kelompok bekerja dan tidak bekerja. Dampak kedua variabel ini semakin kompleks ketika terjadi guncangan ekonomi, seperti pandemi COVID-19, yang secara signifikan memengaruhi inflasi, tingkat pengangguran, serta distribusi pendapatan di daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan inflasi dan pengangguran dengan ketimpangan pendapatan. Beberapa studi menemukan bahwa inflasi dan pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, sementara penelitian lainnya menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel makroekonomi dan ketimpangan pendapatan bersifat kontekstual, sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan karakteristik wilayah (Oktay, 2019).

Berdasarkan kondisi empiris Provinsi Riau serta inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau selama periode 2013–2023. Penelitian ini menguji hipotesis bahwa inflasi dan pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan koefisien Gini. Dengan menggunakan data runtut waktu dan pendekatan kuantitatif, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

empiris dalam memperkaya literatur mengenai determinan ketimpangan pendapatan di tingkat regional, sekaligus menjadi dasar pertimbangan bagi perumusan kebijakan ekonomi daerah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori untuk menganalisis pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau. Populasi penelitian mencakup seluruh kondisi perekonomian Provinsi Riau, dengan unit analisis berupa data runtut waktu (*time series*) tahunan selama periode 2013–2023. Karena seluruh data yang tersedia digunakan, penelitian ini tidak menerapkan teknik sampling, melainkan menggunakan metode sensus terhadap data sekunder yang relevan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dan publikasi resmi terkait. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan koefisien Gini (Gini ratio). Variabel independen meliputi inflasi yang diukur berdasarkan persentase tingkat inflasi tahunan dan pengangguran yang diukur melalui tingkat pengangguran terbuka dalam persentase. Seluruh variabel dinyatakan dalam skala rasio.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah publikasi statistik resmi, laporan tahunan, serta dokumen daring yang relevan. Data dikompilasi dan disusun secara kronologis untuk memastikan konsistensi periode pengamatan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 dengan memanfaatkan data historis sepuluh tahun sebelumnya.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk mengestimasi hubungan antara inflasi dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan.adalah koefisien regresi. Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan uji statistik F guna mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, serta uji statistik t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi variasi ketimpangan pendapatan yang dapat dijelaskan oleh model. Seluruh pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5 persen.

Validitas model regresi diuji melalui serangkaian uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas residual menggunakan uji Jarque–Bera, uji autokorelasi menggunakan Breusch–Godfrey LM Test, uji multikolinearitas berdasarkan nilai tolerance, serta uji heteroskedastisitas untuk memastikan kesamaan varians residual. Model regresi dinyatakan layak apabila seluruh asumsi klasik terpenuhi.

Penelitian ini mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel bersifat linier dan bahwa data yang digunakan telah mencerminkan kondisi ekonomi Provinsi Riau secara akurat. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data agregat tahunan dan cakupan wilayah yang terbatas pada satu provinsi, sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara nasional, melainkan untuk memberikan pemahaman kontekstual mengenai dinamika ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara simultan (sama-sama) yang bertujuan untuk mengetahui apakah dari semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan. Kriteria dalam pengujian ini adalah:

1. Jika F Prob < α (0,05), maka H0 ditolak
2. Jika F Prob > α (0,05), maka H1 diterima

Pada hasil uji F (uji simultan), diketahui bahwa nilai F probabilitas sebesar 0,002854 dimana probabilitas 0,002854 < α (0,05) maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa varaiabel inflasi (X1) dan pengangguran (X2) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y) Provinsi Riau.

Uji parsial, juga dikenal sebagai uji t, adalah analisis koefisien regresi secara parsial. Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dari analisis parsial antara variabel independen dan dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lainnya konsisten. Untuk validitas pengaruh variabel independen dipakai uji t dua sisi. Menentukan tingkat signifikasi (α = 0,05), dengan kriteria apabila Probabilita > α maka H0 diterima dan apabila Probabilita < α maka H0 ditolak.

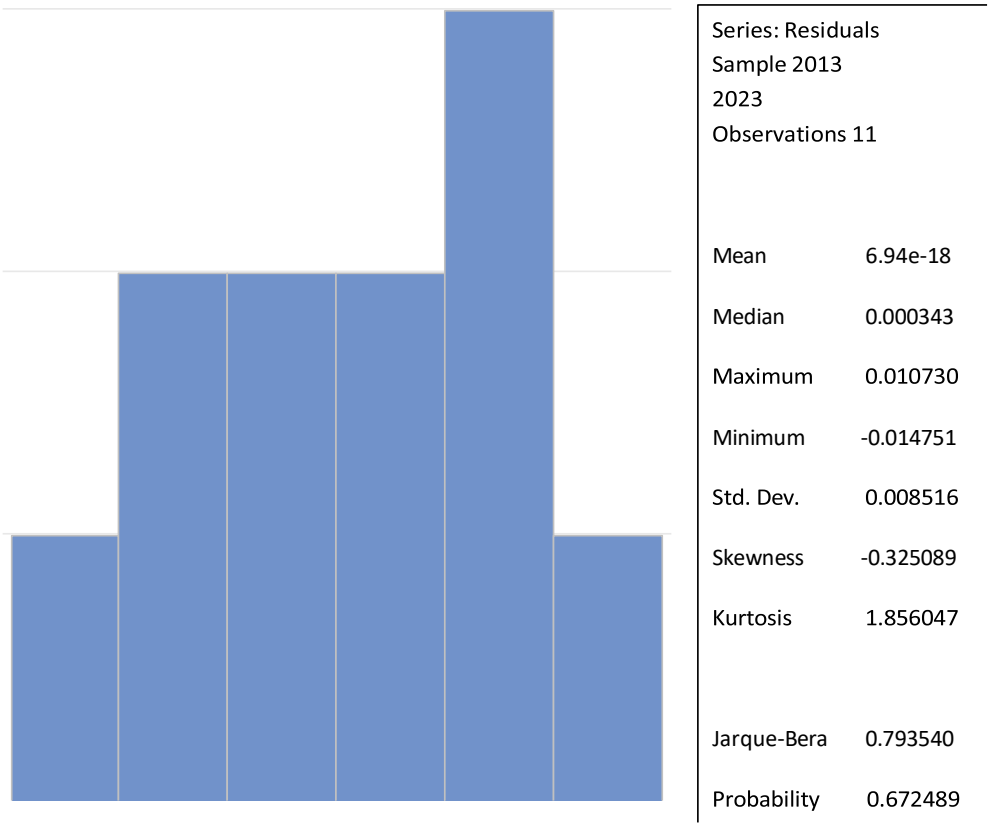
1. Pengaruh Inflasi (X1) terhadap Ketimpangan Pendapatan (Y)

Berdasarkan hasil uji t (parsial), maka dapat dilihat nilai probabilitas inflasi yaitu sebesar 0,2428. Probabilita 0,2428 > 0,05 maka H0 diterima. Hal ini berarti inflasi (X1) secara parsial tidak berpngaruh terhadap ketimpangan pendapatan (Y) Provinsi Riau.

2. Pengaruh Pengangguran (X2) terhadap Ketimpangan Pendapatan (Y)

Berdasarkan hasil uji t (parsial), maka dapat dilihat probabilita pengangguran yaitu sebesar 0,0125. Probabilita 0,0015 < 0,05 maka H0 ditolak. Hal ini berarti tingkat pengangguran (X2) secara parsial berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan (Y) Provinsi Riau.

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam suatu variabel data memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan normal atau tidaknya suatu data adalah Jarque-Bera Test (J-B Test) yang menggunakan distribusi residual. Data yang paling baik adalah data yang memiliki distribusi dengan normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu: jika tingkat signifikansi ≥ 0,05, maka data tersebut normal. Sebaliknya, jika tingkat signifikansi ≤ 0,05, maka data tidak berdistribusi normal (Duli, 2019).



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas (Jarque-Bera)

Dari hasil estimasi regresi di atas, keputusan terdistribusi normal atau tidaknya residual dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilita Jarque- Bera Test Hitung dengan tingkat α *(Alpha)*. Nilai Jarque-Bera Test sebesar 0,793540 dengan probabilita 0,672489. Sehingga dapat dibaca bahwa probabilita dari jarque-Bera Test sebesar 0,672489 > α (0,05) artinya bahwa residual berdistribusi normal.

Uji multikolineritas digunakan untuk mengamati suatu kondisi atau fenomena dimana terjadi hubungan linier atau menunjukkan adanya hubungan yang jelas antar variabel independen dalam suatu model regresi. Jika korelasi antar variabel independen tinggi, maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya mungkin lemah. Pengujian ada tidaknya gejala multikolineritas dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor*, atau VIF. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terdapat indikasi kuat adanya multikolineriatas.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolineriatas (Tolerance dan VIF)

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000188	22.81988	NA
INFLASI	1.90E-06	4.547667	1.027970
PENGANGGURAN	4.54E-06	22.17428	1.027970

Sumber : Data Olahan *Eviews12*, 2025

Berdasarkan hasil olahan data diatas, maka diketahui nilai VIF dari variable independen yaitu VIF X1 (1,027970) dan VIF X2 (41,027970). Dapat dilihat bahwa nilai VIF dari variable-variabel independen tersebut bernilai lebih kecil dari 10 yang artinya keempat variabel tersebut terbebas dari multikolinearitas

Uji heteroskedatisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terjadi kesamaan variabel dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedatisitas dalam penelitian ini, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji White, dimana hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedatisitas (White Test)

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.397424	Prob. F(5,5)	0.8330
Obs*R-squared	3.128373	Prob. Chi-Square(5)	0.6802
Scaled explained SS	0.708241	Prob. Chi-Square(5)	0.9825

Sumber : Data Olahan *Eviews12*, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, diketahui nilai Prob. Chi- Square (5) pada Obs *R-squared yaitu sebesar 0,6802. Karena nilainya 0.6802 > 0,05 maka H0 diterima yang berarti model tidak terkena gejala heteroskedatisitas karena syaratnya adalah Prob. Chi-Square (4) pada Obs *R-squarednya ialah 0,6802 tidak signifikan dan harus lebih besar dari 0,05.

Autokorelasi dapat mengakibatkan hasil estimasi yang kurang akurat dan juga dapat menimbulkan masalah dalam pengujian hipotesis. Salah satu metode yang biasa digunakan untuk menilai autokorelasi adalah Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Karena dapat menilai autokorelasi pada lag tunggal, uji ini lebih fleksibel dibandingkan dengan uji Durbin-Watson. Jika model mengalami autokorelasi, maka error dari satu periode dapat mempengaruhi error dari periode lainnya, yang dapat mengurangi akurasi estimasi model.

Tabel 3. Hasil Uji Autokolerasi (LM Test)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.225271	Prob. F(2,6)	0.8048
Obs*R-squared	0.768303	Prob. Chi-Square(2)	0.6810

Sumber : Data Olahan *Eviews12*, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, diketahui nilai Prob. Chi-Square(2) pada Obs *R-squared yaitu sebesar 0,6810. Karena nilainya 0.6810 > 0,05 maka H0 diterima yang berarti model tidak terkena gejala autokolerasi karena syaratnya adalah Prob. Chi-Square (2) pada Obs *R-squarednya ialah 0,6810 tidak signifikan dan harus lebih besar dari 0,05.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti bahwa koefisien determinasi, yang biasa direpresentasikan dengan R^2, memiliki kemampuan yang signifikan dalam menjelaskan variabel dependen. Jadi koefisien determinasi sebenarnya secara jelas menunjukkan besarnya pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Nilai koefisien determinasi berupa presentase, yang menunjukkan presentase variabel dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Berdasarkan hasil penelitian nilai R^2 adalah 0,768870. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 76% variabel-variabel independen (inflasi dan pengangguran) sudah mewakili untuk menjelaskan variabel dependen (ketimpangan pendapatan) Provinsi Riau. Sedangkan sisanya 24% dijelaskan oleh variabel diluar model.

Untuk mengetahui Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Riau maka dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Untuk mendapatkan hasil dari analisis linear berganda antara variabel dependen ketimpangan pendapatan (Y) dengan variabel independen inflasi (X1) dan pengangguran (X2), diolah menggunakan bantuan program komputer eviews 12 dengan menggunakan metode *Ordinary Lest Square (OLS)*.

Tabel 4. Hasil Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.269821	0.013714	19.67456	0.0000
INFLASI	0.001737	0.001377	1.261251	0.2428
PENGANGGURAN	0.010070	0.002131	4.725611	0.0015
R-squared	0.768870	Mean dependent var		0.339000
Adjusted R-squared	0.711087	S.D. dependent var		0.017714
S.E. of regression	0.009522	Akaike info criterion		-6.243507
Sum squared resid	0.000725	Schwarz criterion		-6.134990
Log likelihood	37.33929	Hannan-Quinn criter.		-6.311912
F-statistic	13.30626	Durbin-Watson stat		1.484536
Prob(F-statistic)	0.002854			

Sumber : Data Olahan *Eviews12*, 2025

Dari persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel inflasi dan tingkat pengangguran, memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan Riau. Dimana, semua variabel tersebut memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau pada tahun 2013-2023.

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 Nilai Konstanta (bo) 0,269821, nilai konstanta ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan pada variabel independen, maka ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau sebesar 0,26 yang termasuk kategori rendah jika tidak ada perubahan pada variabel-variabel tersebut.
2 Nilai Koefisien b_1 0,001737 artinya bahwa variabel inflasi memiliki dampak positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau. Dimana inflasi sebesar 1% akan menaikkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau sebesar 0,001737 dengan ansumsi variabel lain dianggap konstan.
3 Nilai Koefisien b_2 0,010070 artinya bahwa ini menunjukkan variabel pengangguran (X2) memiliki dampak positif terhadap ketimpangan pendapatan
4 (Y) di Provinsi Riau. Dimana kenaikan pengangguran sebesar 1% kenaikan ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau sebesar 0,010070 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
5 Nilai ε (error term) mewakili semua faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan (Y) di Provinsi Riau, tetapi faktor-faktor tersebut tidak dijelaskan atau dimasukkan dalam model regresi ini.

Analisi Pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Riau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat inflasi selama periode 2013-2023 tidak cukup signifikan untuk menyebabkan perubahan dalam distribusi pendapatan. Ketidaksignifikanan ini harus dipahami dalam konteks teori makroekonomi dan struktur ekonomi Provinsi Riau. Menurut Teori Barro-Gordon, inflasi yang tidak terkendali dapat mengurangi daya

beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, yang berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan. Menurut teori ini, pemerintah cenderung mendorong tujuan jangka pendek, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi dampaknya dalam jangka panjang justru merugikan kelompok miskin akibat menurunnya kemampuan konsumsi. Namun, temuan studi ini menyoroti situasi yang berbeda yaitu inflasi di Provinsi Riau tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Ketidaksesuaian antara teori dan temuan penelitian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor struktural. Pertama, berdasarkan data dan literatur yang digunakan dalam studi ini, pendapatan masyarakat Riau sangat stabil, artinya fluktuasi inflasi tidak secara signifikan mengubah pola konsumsi rumah tangga, karena Riau memiliki dominan sektor sumber daya alam, perubahan harga barang konsumsi tidak selalu berdampak signifikan terhadap jumlah rumah tangga tangga. Ketiga, mekanisme harga di wilayah ini lebih stabil akibat pengaruh komoditas besar seperti gas, sawit, dan minyak.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rahman dan Putri (2021), yang menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera. Selain itu, Wijayanti dan Aisyah (2022) menegaskan bahwa inflasi tidak memiliki efek pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara Wahyuni dan Andriyani (2022) juga menyoroti keberhasilan Provinsi Aceh. Pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan cenderung bergantung pada struktur ekonomi daerah dan kemampuan rumah tangga dalam mengonsumsi terkait dengan perubahan harga. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Julihanza and Khoirudin 2023) dan (Wahyuni and Andriyani 2022) bahwa inflasi memiliki pengaruh yang positif.

Analisi Pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatn di Provinsi Riau.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran dapat memperlebar ketimpangan pendapatan, terutama kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sumber. Secara teori, hubungan ini sejalan dengan konsep yang dijelaskan melalui Kurva Phillips, di mana kondisi pengangguran yang tinggi mencerminkan menurunya aktivitas ekonomi sehingga pendapatan masyarakat berkurang dan distribusinya semakin tidak merata. Dalam perspektif teori Keynes mengenai distribusi pendapatan, meningkatnya pengangguran menyebabkan menurunnya pengeluaran agregat dan turunnya daya beli masyarakat secara keseluruhan, sehingga berkontribusi pada meningkatnya kesenjangan pendapatan. Penelitian yang dijelaskan oleh Tiara (2016) dan Asy'ariati (2022) juga menegaskan bahwa distribusi pendapatan menjadi semakin lebar apabila sebagian besar penduduk tidak memiliki akses terhadap pendapatan yang memadai, sementara kelompok berpendapatan tinggi tetap mengalami peningkatan pemasukan.

Penelitian terdahulu juga mendukung temuan ini, seperti peneliti Wirda et al. (2020), Ersad et al. (2022), Rofiuddin et al. (2024), dan Wairooy dan Haryono (2023) menemukan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan menyebabkan rumah tangga tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga memperlebar ketimpangan pendapatan. Meskipun terdapat penelitian yang menemukan pengaruh negatif, temuan tersebut umumnya terjadi pada wilayah yang didominasi sektor informal dengan dinamika pendapatan yang berbeda sehingga tidak relevan dalam konteks Provinsi Riau. Sebaliknya, struktur ekonomi Riau yang didominasi sektor padat modal seperti minyak dan gas, perkebunan kelapa sawit, dan industri besar menyebabkan penciptaan lapangan kerja tidak

sebanding dengan pertumbuhan nilai tambah sektor tersebut. Artinya, ketika perekonomian tumbuh, manfaatnya tidak dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, melainkan terpusat pada kelompok tertentu yang berada pada sektor formal dan sektor berpendapatan tinggi. Kondisi ini semakin diperburuk dengan meningkatnya pengangguran pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19, di mana banyak perusahaan mengurangi aktivitas produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga dampaknya banyak rumah tangga kehilangan pendapatan tetap dan terpaksa beralih ke sektor pekerjaan informal yang tidak stabil. Walaupun tingkat pengangguran sempat menurun setelah pandemi mereda, efek akumulatif dari kehilangan pekerjaan tersebut tetap dirasakan pada distribusi pendapatan. Dalam konteks Kurva U-terbalik Kuznets, Provinsi Riau berada pada fase di mana pertumbuhan ekonomi tidak disertai pemerataan kesempatan kerja, sehingga ketimpangan pendapatan cenderung meningkat meskipun perekonomian secara agregat menunjukkan peningkatan. Fenomena ini terlihat nyata pada pola distribusi pendapatan rumah tangga di Riau, di mana kelompok berpendapatan rendah cenderung semakin tertinggal akibat minimnya lapangan kerja dan rendahnya akses terhadap peluang ekonomi produktif.

Secara keseluruhan, tingginya pengangguran terbukti menjadi penyebab utama meningkatnya ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau. Ketika pengangguran meningkat, pendapatan rumah tangga menurun drastis, daya beli melemah, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi semakin berkurang. Sementara itu, kelompok masyarakat berpendapatan tinggi tetap memperoleh keuntungan dan pendapatan yang stabil dari sektor-sektor yang berkembang. Perbedaan ini menciptakan jurang pendapatan yang semakin lebar. Oleh karena itu, penurunan ketimpangan pendapatan harus dimulai dari upaya mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru, diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan demikian, pengangguran bukan hanya menjadi indikator ekonomi semata, tetapi menjadi faktor kunci dalam memahami dan mengatasi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau lebih dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja dibandingkan oleh dinamika harga. Inflasi tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan selama periode 2013–2023, yang mengindikasikan bahwa mekanisme penyesuaian ekonomi, struktur konsumsi masyarakat, atau kebijakan stabilisasi harga di daerah tersebut mampu meredam dampak inflasi terhadap distribusi pendapatan. Sebaliknya, pengangguran terbukti berperan penting dalam memperlebar ketimpangan pendapatan, karena meningkatnya jumlah penduduk yang tidak bekerja secara langsung membatasi akses terhadap sumber pendapatan dan memperbesar kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Temuan ini memperkuat literatur yang menempatkan pengangguran sebagai determinan utama ketimpangan pendapatan, sekaligus memberikan kontribusi empiris yang kontekstual bagi wilayah berbasis sumber daya alam seperti Provinsi Riau. Dengan demikian, hasil penelitian ini menekankan bahwa upaya pengurangan ketimpangan pendapatan di tingkat regional perlu lebih difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas kesempatan kerja, dibandingkan semata-mata pada pengendalian inflasi, agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara lebih inklusif dan berkelanjutan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau atas ketersediaan dan keterbukaan data yang digunakan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, dan saran yang konstruktif selama proses penyusunan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi regional serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Oktay, Duygu Serin. 2019. "Enflasyon ve İşsizliğin Gelir Eşitsizliği Üzerine Asimetrik Etkisi : Türkiye Örneği Asymmetric Impact of Inflation and Unemployment on Income Inequality : The Case of Turkey."

World Bank. (2022). Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course. Washington, DC: World Bank.

Badan Pusat Statistik. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha 2013–2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

Bank Indonesia. (2023). Laporan Inflasi dan Stabilitas Harga. Bank Indonesia.

Kuncoro, M. (2006). Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan. Upp Stim Ykpn. Yogyakarta

Rahman, Razi, and Dewi Zaini Putri. 2021. "Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi Di Pulau Sumatera." Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan 3(3): 37. doi:10.24036/jkep.v3i3.12368

Wijayanti, Erni Sri, and Siti Aisyah. 2022. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Asing, Inflasi, Dan Trade Openness Terhadap Ketimpangan Di Indonesia Tahun 2000-2020." Ekonomis: Journal of Economics and Business 6(2): 534. doi:10.33087/ekonomis.v6i2.606

Wahyuni, Sri, and Devi Andriyani. 2022. "Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhanekonomi Terhadapketimpangan Pendapatan Diprovinsiaceh." Jurnal Ekonomi Regional Unimal 5(1): 39. doi:10.29103/jeru.v5i1.7919.

Julihanza, Agra, and Rifki Khoirudin. 2023. "Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Sumatera." Journal of Macroeconomics and Social Development 1(2): 1–12. doi:10.47134/jmsd.v1i2.93.

Asy'ariati, F. A., Wahyudi, H., Murwiati, A., Nirmala, T., & Taher, A. R. Y. (2022). Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. E-journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship (EFEBE), 1(1), 11-21

Tiara, S. (2016). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Propinsi Sumatera Utara. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 16(1), 1-16.Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "Indeks Rasio Gini."

Ersad, Muhamnad Ersad, Amri Amir, and Zulgani Zulgani. 2022. "Dampak IPM, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sumatera Bagian Selatan." Jurnal Paradigma Ekonomika 17(2): 425–38. doi:10.22437/jpe.v17i2.15614.

Rofiuddin, Mohammad, Universitas Airlangga, Universitas Islam, and Negeri Salatiga. 2024. "Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Negara Middle Income Dan High Income : Pendidikan , Pengangguran , Upah , Dan Inflasi." 4(2): 342–52.

Wairooy, Fatimah Azzahra, and Slamet Haryono. 2023. "Pengaruh Foreign Direct Investment, Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Corruption Perception Index Sebagai Variabel Moderasi." Jurnal Magister Ekonomi Syariah 2(1 Juni): 37–50. doi:10.14421/jmes.2023.021- 03